





TRIBUN JOGJA/HENDRA KRISDIANTO

**PEMBANGUNAN** - Sebuah bangunan dalam proses pembangunan di kawasan Kotabaru Yogyakarta, Minggu (14/9). Sesuai aturan Pemerintah Kota, pembangunan di kawasan cagar budaya harus menyesuaikan karakter kawasan.

### Pengecekan Hotel Dilakukan dari Pintu ke Pintu

**IN DEPTH NEWS**    **YOGYA, TRIBUN** - untuk memastikan setiap sudut bangunan sesuai dengan rancangan bangun hasil rekomendasi Disparbud, khususnya untuk hotel-hotel yang dibangun di kawasan cagar budaya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogyakarta melakukan pengecekan pembangunan hotel di wilayah setempat secara detail, dari pintu ke pintu. Hal itu

■ Bersambung ke Hal 14

---

### Pengecekan Hotel

Sambungan Hal 13

budaya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharsono, menegaskan hal tersebut, Senin (15/9).

Pekan lalu, tim Disparbud Kota Yogyakarta juga telah turun ke lapangan mengecek beberapa lokasi pembangunan hotel. Menurutnya, hasil pantauan di lapangan pekan lalu masih akan disinkronkan dengan gambar rancangan hasil rekomendasinya.

"Kami masih akan meneliti hasil cek minggu lalu. Nah, pekan ini kami lanjutkan cek ke lokasi lainnya, kami akan lakukan cek dari pintu ke pintu," kata Eko.

Dugaan pelanggaran pada pembangunan hotel sejauh ini belum ditemukannya. Namun, menurutnya, ada sebuah bangunan non-hotel di kawasan budaya Malioboro yang diduga melanggar. Bangunan yang dimaksud, yaitu sebuah bank lokal. Menurut Eko, letak kesalahannya pada bentuk jendela.

"Semula kami rekomendasikan bentuk bangunan keseluruhan menyesuaikan karakter kawasan Malioboro yang bernuansa kolonial berpadu dengan gaya *chinese*. Tapi nampaknya bentuk jendela berbeda, diduga tidak sesuai," ujarnya.

Di wilayah Yogyakarta, lanjut Eko, terdapat lima kawasan cagar budaya. Disebutkan, kawasan itu adalah kawasan Kotabaru yang karakter bangunannya cenderung bernuansa kolonial. Malioboro yang beberapa memiliki campuran gaya *chinese*, sekitar benteng yang kebanyakan merupakan campuran antara kolonial dan Jawa, Pakualaman dan kawasan Kotagede yang kebanyakan bangunan Jawa.

Eko menyebut, secara keseluruhan kawasan-kawasan itu bisa mengadopsi ciri khas arsitektur neo-klasik, *art novo* dan *art deco*. Ia mencontohkan, sebuah hotel yang akan berdiri di sisi timur kantor Disparbud Kota Yogyakarta, memanfaatkan bangunan lama di lokasi. Sesuai rekomendasi Eko, hotel tersebut diwajibkan memiliki bagian depan dengan bangunan lebih rendah, bergaya kolonial *art deco*.

"Kami wajikan bagian depan hotel yang dibangun lebih rendah (semacam *lobi*), dengan ciri khas arsitektur kolonial *art deco*. Kalau itu sudah ada, di belakang mau dibuat tingkat berapa boleh. Yang penting *building codes* kawasan ini tidak hilang," lanjutnya.

Bangunan rendah di bagian depan setiap hotel dimaksudkan untuk menonjolkan ciri khas bangunan kawasan lokasi pendiriannya. Hal itu, menurutnya, wajib dipenuhi dalam pembangunan hotel baru di Kota Yogyakarta.

Demikian juga hotel yang akan dibangun di Mantrijeron, harus menyesuaikan karakter *ngabon beteng*, dan hotel di wilayah Kumendaman, harus menyesuaikan kawasannya.

"Kalau melanggar, kami akan surati Dinas Perizinan agar hotel itu dibongkar dan segera menyesuaikan. Kami menerapkan kebijakan ini berdasar perda, bahwa setiap pembangunan di kawasan budaya harus mendapat rekomendasi dinas terkait," katanya.

Untuk bangunan-bangunan yang termasuk dalam benda cagar budaya, menurutnya, tidak boleh direbongkar. Sebab itu, sejauh ini Eko mengaku belum pernah memberikan rekomendasi pembangunan hotel yang memanfaatkan bangunan cagar budaya. (ose)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			

Yogyakarta, 25 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005